



OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI STRATEGI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MOOTILANGO

OPTIMIZING COMMUNITY PARTICIPATION THROUGH GOVERNMENT STRATEGIES IN VILLAGE DEVELOPMENT IN MOOTILANGO DISTRICT

Nurfadila Nabu^{1*}, Rusli Isa², Raihan Hanasi³

^{1*}Universitas Negeri Gorontalo, Email : nurfadilnabu@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email : rusli_isa@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email : raihan@ung.ac.id

*email koresponden: nurfadilnabu@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3399>

Abstrack

This study aims to identify and analyze the Mootilango District Government's strategy for increasing community participation in village development based on four strategic dimensions according to Kotten (2006): organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The study employed a qualitative, descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which encompasses data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. Data validity was tested through triangulation of sources, techniques, and time. The results indicate that the Mootilango District Government's strategy for increasing community participation has been implemented and is sufficiently effective in supporting community involvement, but is not yet fully optimal. In the organizational strategy dimension, development direction is determined by referring to the regional vision and mission, community needs, village aspirations, development priorities, and budgetary capacity through coordination and deliberation forums. In the program strategy dimension, the government develops and implements programs based on community needs, including infrastructure development, community empowerment, mutual cooperation, and social activities, involving the community from the planning, implementation, monitoring, and evaluation stages. In the resource support strategy dimension, the government provides guidance and capacity building for civil servants and the community, manages budgets based on priorities, provides supporting facilities, and utilizes direct communication and digital media to disseminate development information. In the institutional strategy dimension, participation is strengthened through coordination and collaboration between sub-district governments, village governments, the Village Consultative Body (BPD), community organizations, community leaders, the community, and other stakeholders. However, the strategy's implementation still faces limitations in budget, human resource capacity, facilities and infrastructure,



access to information and technology, unequal distribution of community presence and awareness, and the need to strengthen communication and coordination between institutions.

Keywords: Government Strategy, Community Participation, Village Development, Organizational Strategy, Program Strategy, Resources, Institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa berdasarkan empat dimensi strategi menurut Kotten (2006), yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dan cukup mampu mendukung keterlibatan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi strategi organisasi, arah pembangunan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi daerah, kebutuhan masyarakat, aspirasi desa, prioritas pembangunan, dan kemampuan anggaran melalui koordinasi serta forum musyawarah. Pada dimensi strategi program, pemerintah menyusun dan melaksanakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Pada dimensi strategi pendukung sumber daya, pemerintah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat, mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas, menyediakan sarana pendukung, serta memanfaatkan komunikasi langsung dan media digital untuk menyampaikan informasi pembangunan. Pada dimensi strategi kelembagaan, partisipasi diperkuat melalui koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses informasi dan teknologi, belum meratanya kehadiran dan kesadaran masyarakat, serta perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Strategi Organisasi, Strategi Program, Sumber Daya, Kelembagaan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, termasuk melalui pembangunan di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi, anggaran, dan kebutuhan masyarakatnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun dan menerapkan strategi yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Strategi merupakan penentuan tujuan jangka panjang organisasi serta penetapan tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya (Chandler, 1962). Hunger dan Wheelen (2012) menjelaskan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Dalam pembangunan desa, strategi pemerintah diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang



menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan mudah diakses sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pembangunan desa karena masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan dan permasalahan di lingkungannya. Partisipasi tidak hanya berupa kehadiran dalam kegiatan gotong royong, tetapi mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Namun, berdasarkan observasi awal di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, minimnya keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, serta rendahnya kepedulian terhadap pemeliharaan hasil pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan masih cenderung didominasi oleh pemerintah desa sehingga kesadaran kolektif dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan belum berkembang secara optimal.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui konsep strategi Kotten (2006) yang mencakup empat dimensi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi organisasi berkaitan dengan arah kebijakan, visi, misi, serta langkah pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Mootilango, masih ditemukan keterbatasan dalam komunikasi dan sosialisasi pembangunan sehingga kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes belum optimal. Strategi program berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melaksanakan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi masih perlu ditingkatkan. Strategi pendukung sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, informasi, dan teknologi. Keterbatasan penyebaran informasi serta kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya partisipasi menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan. Sementara itu, strategi kelembagaan berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah desa dan berbagai unsur kelembagaan seperti BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum sepenuhnya optimal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mencakup komunikasi dan sosialisasi yang efektif, program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dukungan sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Penerapan keempat dimensi strategi Kotten (2006) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya secara kuantitatif melalui kehadiran dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga secara kualitatif melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan perspektif Kotten (2006). Fokus penelitian meliputi strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan keempat strategi tersebut dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada pembangunan desa. Secara teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu sosial, khususnya kajian pembangunan dan partisipasi masyarakat desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pembangunan



yang lebih partisipatif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi masyarakat yang masih memiliki interaksi sosial dan budaya gotong royong, tetapi cenderung pasif dalam kegiatan formal pemerintahan seperti musyawarah desa dan perencanaan pembangunan, menjadi fenomena yang penting untuk dikaji. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, meliputi prasurvei, penyusunan instrumen, observasi, wawancara, pengumpulan dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan interaksi, komunikasi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual strategi pemerintah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi partisipatif terhadap aktivitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa profil desa, RPJMDes, laporan realisasi anggaran pembangunan, data demografi, serta dokumentasi kegiatan musyawarah dan gotong royong. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang sehingga informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih objektif dan komprehensif.

Informan penelitian dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas Camat Mootilango, Kaur Perencanaan, Kepala Desa Payu, Kepala Desa Paris, Kepala Desa Sukamaju, anggota BPD, serta masyarakat dari desa-desa tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat, wawancara untuk menggali strategi komunikasi, koordinasi, serta kendala partisipasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen perencanaan, daftar hadir musyawarah, dan foto kegiatan pembangunan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dipilah sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, bagan, atau tabel untuk menemukan pola hubungan antara strategi pemerintah dan respons masyarakat. Kesimpulan selanjutnya diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan hingga diperoleh data yang kredibel dan mampu menjawab fokus penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu pengamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan empat dimensi strategi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Pada dimensi strategi organisasi, pemerintah Kecamatan Mootilango menetapkan arah pembangunan dengan mengacu pada visi dan misi daerah serta kebutuhan masing-masing desa. Penetapan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, terutama melalui forum musyawarah dengan mempertimbangkan aspirasi, prioritas pembangunan, kondisi desa, dan kemampuan anggaran. Kebijakan pembangunan



disosialisasikan secara berjenjang melalui rapat koordinasi, pembinaan, Musrenbang, musyawarah desa, pertemuan warga, serta melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan melalui Musdes dan Musrenbang, termasuk melalui keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kelompok tani, dan BPD.

Namun, pelaksanaan strategi organisasi masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan kehadiran masyarakat dalam musyawarah, kesibukan bekerja, rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan kepada masyarakat, peningkatan komunikasi, sosialisasi, pembinaan, dan pemberian pemahaman mengenai skala prioritas pembangunan.

Pada dimensi strategi program, penyusunan program pembangunan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Usulan kemudian dibahas dan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan, manfaat, urgensi, prioritas, serta kemampuan anggaran. Program yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, jalan dan drainase, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, kerja bakti, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan melalui penyampaian pendapat, tenaga, pemikiran, dan pengawasan. Evaluasi dilakukan melalui rapat, pengamatan hasil kegiatan, pembahasan tingkat partisipasi, serta penerimaan masukan dari masyarakat untuk menjadi bahan perbaikan program berikutnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga penentuan skala prioritas tetap diperlukan.

Pada dimensi strategi pendukung sumber daya, pemerintah melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Pengelolaan anggaran diarahkan pada program prioritas berdasarkan hasil musyawarah serta digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana desa serta teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan mempercepat penyampaian informasi pembangunan. Pemanfaatan media komunikasi, termasuk grup komunikasi masyarakat, membantu warga memperoleh informasi, menyampaikan tanggapan, menyesuaikan waktu untuk berpartisipasi, dan melakukan pengawasan. Namun, strategi ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam menerima informasi dan menggunakan teknologi.

Pada dimensi strategi kelembagaan, pemerintah Kecamatan Mootilango, pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan membangun koordinasi melalui rapat, musyawarah, pembinaan, dan komunikasi langsung. Pembagian peran serta keterlibatan antarlembaga dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam penyelesaian permasalahan, persoalan terlebih dahulu dibahas pada tingkat desa bersama pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan apabila memerlukan penanganan lebih lanjut. Penguatan kelembagaan memberikan kejelasan pembagian tugas, menjadi saluran penyampaian aspirasi, memperlancar informasi, serta membantu mengorganisasi keterlibatan masyarakat. BPD dan lembaga kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan konsistensi setiap lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan rangkaian yang dimulai dari penetapan arah pembangunan, diterjemahkan ke dalam program, didukung oleh sumber daya, serta diperkuat melalui kelembagaan dan kerja sama antarpihak. Strategi tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pemerataan informasi, serta konsistensi keterlibatan masyarakat.



Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menempatkan temuan lapangan dalam kerangka teori strategi organisasi publik menurut Kotten (2006), konsep strategi pemerintah, organisasi publik, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dianalisis melalui empat dimensi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

Pada dimensi Strategi Organisasi, Pemerintah Kecamatan Mootilango telah menetapkan arah pembangunan berdasarkan visi dan misi daerah, kebutuhan desa, aspirasi masyarakat, serta kemampuan anggaran. Penetapan arah dilakukan melalui koordinasi, pembinaan, dan forum musyawarah dengan menghimpun usulan dari desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Kotten (2006) yang memandang strategi organisasi sebagai dasar penentuan arah dan tujuan organisasi, serta Bryson (2018) yang menekankan pentingnya identifikasi tujuan, analisis lingkungan, dan penyusunan tindakan dalam organisasi publik. Penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan kebutuhan setiap desa sebelum menentukan prioritas. Pertimbangan kemampuan anggaran juga sesuai dengan David dan David (2020) yang mengaitkan strategi dengan tujuan jangka panjang dan alokasi sumber daya secara efektif.

Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui rapat koordinasi, pembinaan, Musrenbang, musyawarah desa, pertemuan warga, serta komunikasi berjenjang dari kecamatan kepada desa dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Syafiie (2006) bahwa keberhasilan organisasi publik dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, kepemimpinan, dan sumber daya manusia. Pada aspek partisipasi, pelibatan masyarakat dalam Musdes dan Musrenbang sesuai dengan Cohen dan Uphoff (1980) yang memandang partisipasi sebagai keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Hal tersebut juga sejalan dengan Davis (1977) yang menempatkan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam mencapai tujuan bersama serta Conyers (1994) yang menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai kebutuhan lokal dalam perencanaan pembangunan.

Meskipun demikian, strategi organisasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat rendahnya kehadiran sebagian masyarakat, keterbatasan waktu akibat pekerjaan, belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, keterbatasan anggaran, perbedaan kebutuhan masyarakat, dan belum dapat direalisasikan seluruh usulan secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tersedianya forum partisipasi belum otomatis menghasilkan keterlibatan yang merata dan konsisten. Temuan tersebut sejalan dengan Poister, Pitts, dan Edwards (2010) serta Andrews, Boyne, dan Walker (2006) yang menekankan pentingnya kejelasan arah strategis bagi koordinasi dan kinerja organisasi publik. Sementara itu, Sasmita (2022) menunjukkan bahwa implementasi strategi pemerintah juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, sedangkan Putri dan Priyanti (2024) menegaskan pentingnya komunikasi yang inklusif dalam meningkatkan partisipasi.

Pada dimensi Strategi Program, pemerintah menyusun program berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui Musdes dan Musrenbang. MP (3/8/2026), RL (3/8/2026), HT (29/6/2026), AD (5/8/2026), dan HS (3/7/2026) menjelaskan bahwa usulan masyarakat menjadi bahan penentuan program dan prioritas pembangunan. Program yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, serta gotong royong. Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan melalui penyampaian gagasan, tenaga, dan pengawasan. Temuan ini sesuai dengan Kotten (2006) bahwa strategi program merupakan penerjemahan tujuan organisasi ke dalam kegiatan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program juga dapat membentuk *sense of ownership*, karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi ikut menentukan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan hasil kegiatan dengan memperhatikan tingkat keterlibatan masyarakat, kendala, serta masukan sebagai bahan perbaikan program berikutnya. Namun, implementasi strategi program masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, pengetahuan masyarakat, akses informasi, serta perbedaan kebutuhan



dan kepentingan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan Sasmita (2022) dan Rahman dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, anggaran, dan partisipasi dapat memengaruhi optimalisasi strategi pembangunan. Dengan demikian, strategi program telah membuka ruang partisipasi, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi dan evaluasi.

Pada dimensi Strategi Pendukung Sumber Daya, pemerintah melakukan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas. MP (3/8/2026) dan RL (3/8/2026) menjelaskan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat, yang diperkuat oleh keterangan HT (29/6/2026), AD (5/8/2026), HS (3/7/2026), TD (29/6/2026), dan NT (5/8/2026). Anggaran diarahkan pada program prioritas berdasarkan hasil musyawarah, sedangkan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat. Informasi pembangunan juga disampaikan melalui komunikasi langsung dan media digital.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung partisipasi. Namun, keterbatasan anggaran, tenaga yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan, fasilitas yang belum merata, serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan teknologi masih menjadi kendala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya berkaitan erat dengan strategi program karena program yang telah dirancang secara partisipatif membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, pemerataan informasi, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan prioritas perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pada dimensi Strategi Kelembagaan, koordinasi pembangunan dilakukan melalui rapat, musyawarah, komunikasi langsung, pembinaan, dan pengawasan yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. SM (5/8/2026) dan SK (3/7/2027) menjelaskan bahwa BPD dan lembaga kemasyarakatan berperan dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pembagian peran tersebut memperjelas saluran komunikasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan.

Temuan ini sejalan dengan Syafie (2006) yang menekankan pentingnya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi publik. Selain itu, Osborne (2006) menekankan tata kelola kolaboratif, sedangkan Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014), Bryson, Crosby, dan Stone (2006), serta Ansell dan Gash (2008) menempatkan kolaborasi antarlembaga sebagai unsur penting dalam menciptakan nilai publik, partisipasi, dan kepercayaan. Dalam penelitian ini, kerja sama dilakukan melalui musyawarah, pembagian peran, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan bersama. Mekanisme penyelesaian masalah juga dilakukan melalui pemerintah desa, BPD, dan lembaga terkait sebelum diteruskan ke kecamatan apabila memerlukan kewenangan lebih lanjut. Hal ini memperkuat konsep Cohen dan Uphoff (1980) bahwa partisipasi juga mencakup evaluasi dan pemberian masukan terhadap pembangunan.

Penguatan kelembagaan membantu meningkatkan partisipasi melalui penyediaan saluran aspirasi, pembagian peran yang lebih jelas, serta perluasan komunikasi dan mobilisasi masyarakat. MP (3/8/2026), RL (3/8/2026), HT (29/6/2026), AD (5/8/2026), HS (3/7/2026), TD (29/6/2026), NT (5/8/2026), HP (3/7/2026), EM (29/6/2026), dan SM (5/8/2026) menunjukkan bahwa lembaga yang aktif memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengikuti pembangunan. Namun, keberadaan lembaga secara formal belum otomatis menghasilkan partisipasi yang optimal. SK (3/7/2027) menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan tetap membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang konsisten.

Secara keseluruhan, keempat dimensi strategi menurut Kotten (2006) menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Strategi organisasi memberikan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, strategi program menerjemahkan arah tersebut ke dalam kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat, strategi pendukung sumber daya menyediakan kapasitas, anggaran, fasilitas, informasi, dan teknologi; sedangkan strategi kelembagaan memperkuat koordinasi, pembagian peran, dan kerja sama antarpihak. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat



tidak hanya bergantung pada tersedianya forum musyawarah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menghubungkan arah pembangunan, program, sumber daya, dan kelembagaan secara terpadu.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, strategi Pemerintah Kecamatan Mootilango telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam perencanaan, melaksanakan kegiatan, melakukan pengawasan, serta menyampaikan masukan dan keluhan melalui saluran kelembagaan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses informasi dan teknologi, serta belum meratanya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan strategi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, pengelolaan sumber daya berdasarkan prioritas, pemerataan informasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kesinambungan antara hasil musyawarah, pelaksanaan program, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, strategi yang telah diterapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, merata, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Strategi Organisasi Pemerintah Kecamatan Mootilango dilaksanakan melalui penetapan arah dan tujuan pembangunan yang mengacu pada kebijakan daerah, kebutuhan masyarakat, aspirasi desa, serta kemampuan anggaran. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dilakukan melalui rapat koordinasi, pembinaan, musyawarah desa, dan Musrenbang. Strategi ini cukup mendukung peningkatan partisipasi masyarakat, meskipun masih terkendala rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga, kesibukan bekerja, ketidakmerataan kehadiran dalam musyawarah, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan komunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbukaan mengenai prioritas serta tindak lanjut aspirasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pada dimensi Strategi Program, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa menyusun program berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat, urgensi, serta kemampuan anggaran. Program mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Strategi ini cukup mendukung peningkatan partisipasi, tetapi keterbatasan anggaran dan kemampuan pelaksanaan menyebabkan belum seluruh usulan dapat direalisasikan. Penguatan diperlukan melalui penentuan prioritas secara transparan, konsistensi pelibatan masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pada dimensi Strategi Pendukung Sumber Daya, pemerintah kecamatan mendukung partisipasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas aparatur dan warga, pengelolaan anggaran berdasarkan prioritas, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta penyampaian informasi secara langsung dan melalui media digital. Dukungan tersebut memungkinkan masyarakat berkontribusi melalui tenaga, pemikiran, dan pengawasan pembangunan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta ketidakmerataan akses informasi dan kemampuan teknologi masih menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, pengelolaan anggaran yang efektif, serta pemerataan fasilitas dan akses informasi.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pada dimensi Strategi Kelembagaan, pemerintah kecamatan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat melalui rapat, musyawarah, pembinaan, dan pengawasan. Kelembagaan berperan sebagai saluran aspirasi, pengorganisasi keterlibatan masyarakat, dan sarana penyelesaian permasalahan pembangunan. Strategi ini cukup mendukung peningkatan partisipasi, tetapi masih memerlukan konsistensi koordinasi, kejelasan pembagian peran, dan peningkatan kapasitas lembaga. Penguatan komunikasi dan kesinambungan kerja sama diperlukan agar partisipasi masyarakat semakin aktif, terarah, dan berkelanjutan.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2006). Strategy Content and Organizational Performance: An Empirical Analysis. *Public Administration Review*, 66(1), 52–63. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00555.x>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(S1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Chandler, A. D., Jr. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- David, F. R., & David, F. R. (2020). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. 17th ed. Pearson.
- Davis, K. (1977). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. 13th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?. *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Poister, T. H., Pitts, D. W., & Edwards, L. H. (2010). Strategic Management Research in the Public Sector: A Review, Synthesis, and Future Directions. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 522–545. <https://doi.org/10.1177/0275074010370617>
- Putri, Z. A., & Priyanti, E. (2024). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 5(2), 243–254. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i2.19425>
- Rahman, R., Arsyad, D. H., & Nur'Aini, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Air Terjun Tattiri di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 100–105. <https://doi.org/10.56630/jsp.v1i2.836>
- Sasmita, V. A., & Indartuti, E. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Destinasi Wisata Wahana Gangga Buya di Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(5).
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.